

p r o f i l

Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir

Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan

Bandar Lampung

2 0 0 1



Profil

Sumberdaya Wilayah Pesisir

Desa Pematang Pasir

Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan



Tim Editor

**Budy Wiryawan
Hermawati Puspitasari
Ali Kabul Mahi
Marizal Ahmad
Handoko Adi Susanto**

Dana untuk persiapan dan percetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan USAID/CRC-URI Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP)

Dicetak di : Jakarta

Kutipan : Wiryawan, B., H. Puspitasari, A.K. Mahi, M. Ahmad, H. A. Susanto. 2001. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Penerbitan Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Narraganset, Rhode Island. 40 pp

Kredit :

Foto-foto dan peta : Hermawati P., Handoko A.S., Lisa Rogers, Darmoko, Theo Endarko

Lay out : Pusus Legowo, Handoko Adi Susanto

ISBN : 979-9336-.....?

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Bahan organik	: Material terlarut yang dihasilkan dari limbah tambak	KK	: Kepala Keluarga
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KWH	: <i>Kilo Watt Hour</i>
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
BPD	: Badan Perwakilan Desa	LPSM	: Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
BPN	: Badan Pertanahan Nasional	LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
CRMP	: <i>Coastal Resources Management Project</i> (Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir)	Mangrove	: Komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang dapat tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai bersubstrat lunak
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota kesepahaman)
Erosi	: Pengikisan batuan padat atau tanah oleh angin, air, atau tanah longsor dengan kecepatan yang lebih tinggi dari proses pembentukan tanah untuk menggantinya. Sebaliknya adalah sedimentasi.	MTs	: Madrasah Tsanawiyah (setingkat SLTP)
Estuari/muara	: Daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan sungai dengan pantai	RT	: Rumah Tangga
Fisiografi	: Gambaran pola bentang lahan sebagai produk proses pembentukan bentang alam yang dipengaruhi oleh keadaan geologi, iklim, dan kekuatan baik dari dalam maupun dari luar bumi (endogen dan eksogen).	PJS	: Pejabat Sementara
Habitat	: Struktur lingkungan tempat hidup tumbuh-tumbuhan atau hewan, biasanya menurut tipe bentuk kehidupan utama (misalnya bakau, lamun, dsb).	PKSPL	: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Intrusi	: Arti harfiahnya adalah masuk secara paksa, istilah ini sering digunakan tentang proses masuknya air laut ke daratan sehingga air tanah yang berada jauh dari laut terasa payau atau asin.	PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Kadus	: Kepala Dusun	Profil	: Gambaran nyata tentang suatu obyek
Kaur	: Kepala Urusan	Profil sumberdaya pesisir:	Suatu deskripsi tentang kondisi sumberdaya pesisir dan isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya tersebut
		Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
		Sabuk hijau	: Atau <i>green belt</i> merupakan suatu jalur vegetasi sepanjang perbatasan zona peralihan, yang memisahkan suatu tipe daerah sumber daya dari sumberdaya lainnya
		Salinitas	: Kadar garam yang umumnya dinyatakan dalam per mil atau perseribu atau ppt (<i>part per thousand</i>).
		SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
		SMU	: Sekolah Menengah Umum
		USAID	: <i>United States Agency for International Development</i> (Lembaga bantuan Amerika Serikat untuk Pembangunan Dunia)
		YPU	: Yayasan Pembina Umat

KATA PENGANTAR

Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Project/CRMP*, adalah bagian dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam USAID-BAPPENAS, yang telah melakukan kegiatannya di Lampung sejak tahun 1998. Misi dari program ini adalah untuk mencapai hasil yang nyata ke arah desentralisasi dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Misi ini sangat relevan dengan adanya peningkatan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999.

Proyek Pesisir Lampung, yang diresmikan Juli 1998, secara khusus diimplementasikan melalui MoU antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan/PKSPL, Institut Pertanian Bogor dengan *Coastal Resources Center*, University of Rhode Island, berusaha mengembangkan strategi dan metode terbaik dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang disusun melalui kerjasama dengan masyarakat lokal dan institusi terkait dengan pengelolaan sumberdaya, baik di kabupaten/kota maupun di propinsi.

Setelah menyelesaikan pembuatan profil sumberdaya pesisir Lampung, yang dikemas dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir yang pertama di Indonesia, maka kegiatan tahun kedua, Proyek Pesisir telah memfasilitasi Pemerintah Propinsi Lampung dalam pembuatan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir (Renstra Pesisir). Paralel dengan kegiatan tersebut, Proyek Pesisir beserta mitra kerjanya dari LSM lokal (LPSM Yasadhana, LSM Mitra Bentala dan LSM Alas Indonesia) mengembangkan program pengelolaan sumberdaya pesisir di tingkat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki serta mempertahankan kualitas sumberdaya pesisir.

Program pengelolaan sumberdaya pesisir di tingkat desa telah dimulai bulan September 1999, setelah melalui serangkaian seleksi desa di wilayah Pantai Timur. Dari sembilan desa pesisir, maka dipilih Desa Pematang Pasir, setelah direkomendasikan oleh Tim Pengarah Propinsi dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini sarat dengan isu-isu pengelolaan pesisir seperti konversi mangrove menjadi tambak, abrasi, tanah timbul, ketidakjelasan status lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Adapun penekanan kegiatan aksi di lapangan adalah pengelolaan tambak ramah lingkungan berbasis masyarakat dan rehabilitasi mangrove.

Proses pembuatan profil Desa Pematang pasir ini cukup panjang, melalui Tim Pantai Timur (Proyek Pesisir dan LSM) melibatkan banyak penduduk setempat untuk menggali kondisi biofisik, sosial ekonomi masyarakat, dan kelembagaan yang ada. Beberapa kegiatan utama yang sinergi dengan pembuatan profil desa adalah:

1. Sosialisasi terhadap misi dan visi Tim Pantai Timur
2. Identifikasi isu-isu pengelolaan bersama masyarakat
3. Survei sosial ekonomi di desa bersama masyarakat
4. Pelatihan dan fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat serta pelatihan pengelolaan organisasi
5. Konsultasi dan verifikasi draft dokumen profil sumberdaya pesisir
6. Pengoperasian tambak percobaan
7. Memfasilitasi pembuatan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk konservasi wilayah pesisir

Profil ini merupakan salah satu bagian dari suatu proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat. Proses ini sangat penting sebagai bahan acuan dalam membuat perencanaan kegiatan di desa. Terlebih lagi bila kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Semoga profil ini bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam mengelola wilayah pesisir yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bandar Lampung, Maret 2001

Dr. Budy Wiryawan
Program Manager, Proyek Pesisir Lampung

Dr. Dietrich G. Bengen
Program Coordinator, Proyek Pesisir CRC/PKSPL – IPB, Bogor

Ian M. Dutton, Ph.D
Team Leader, Proyek Pesisir Indonesia

UCAPAN TERIMAKASIH

Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir dapat disusun atas dukungan dari berbagai pihak baik secara individu maupun lembaga. Dengan partisipasi aktif masyarakat Desa Pematang Pasir dan sejumlah tenaga ahli, kami berusaha memperoleh data baru yang obyektif dan akurat. Kami mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati Lampung Selatan Bapak Amreyza Anwar, Bupati Lampung Selatan Bapak Zulkifli Anwar, Tim Pengarah Propinsi dan Pokja Pesisir Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten *Task Force*), serta Pembantu Kecamatan Perwakilan Ketapang, Bapak Maturidi Ismail atas segala dukungan dan masukan dalam mendorong masyarakat desa dan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Pematang Pasir.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bahrin (alm), Bapak Supomo T.H. Wardoyo (alm), Bapak M. Akib, Bapak Heryandi, Ibu Ari Darmastuti, Ibu Erna Rochana, Bapak Basrowi, Ibu Kurniastuti, Ms. Jessica Cook yang telah



membantu mengadakan studi-studi di Desa Pematang Pasir dalam mendukung penyusunan profil ini. Juga terima kasih kepada M. Khazali dari *Wetland International Indonesia Programme* yang telah menemani kami dalam melaksanakan studi banding pengelolaan mangrove di Jawa.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Wandoyo dan Herza Yulianto (LSM Mitra Bentala), Ivan Rajendra dan Venny Marlinda (LSM Alas Indonesia), Theo Endarko, Yusuf Kriswadi, Tanto, dan Heri Hermiyatono (LPSP Yasadhana) yang telah bekerja keras dengan kami dalam mengumpulkan data primer dan sekunder.

Kepada seluruh masyarakat Desa Pematang Pasir terutama Mas Darmoko, Mas Amrullah, Pak Dalil, Pak Chaerudin, Pak Satiman, Pak Sawon, Pak Suratman, Pak Paryono, Mas Heru, Pak Umar, Pak Jamin, Pak Saka, Pak Sugino, Pak Suroto, Pak Sukarto, Ibu Wanti, Pak Slamet, Pak Bambang, Pak Tugiono, Pak Marjono, Pak Sumosemin, Pak Harjogini, Pak Khumaedi, Pak Rasimun, Ibu Komariah, dan Pak Suratmin kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas partisipasi aktif dalam proses penyusunan profil ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Learning Team, Bapak Fedi Sondita, Ibu Neviati, Bapak Bambang, Bapak Amir, dan Bapak Burhan yang telah memberikan saran-saran dalam penggalan isu dan pendokumentasian kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pematang Pasir. Terima kasih kami sampaikan kepada Production House, Ibu Kun, Ibu Tiene, Pak Yayak, Pak Pepen, dan Pak Patus, yang telah bekerja keras menyelesaikan profil ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dan kepada semua staf Proyek Pesisir Lampung dan Jakarta atas segala bantuannya dan kepada USAID (*United States Agency for International Development*) atas dukungan dana yang telah diberikan.

Bandar Lampung, Maret 2001

Editor

SAMBUTAN KEPALA DESA

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya buku Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya profil ini diharapkan akan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan wilayah Pematang Pasir Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan secara berkesinambungan.

Buku profil ini disusun untuk menggambarkan potensi utama wilayah pesisir Desa Pematang Pasir dan juga menggambarkan kegiatan utama yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Informasi-informasi tersebut digali dari masyarakat dengan menginventarisasi isu-isu yang ada di desa. Data yang terkumpul dianalisis oleh Tim Pantai Timur bersama-sama Proyek Pesisir Lampung, dan hasilnya dikonfirmasi kembali kepada masyarakat, yang akhirnya disusun dalam bentuk buku Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir yang siap dipublikasikan. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan, serta dapat dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berlokasi di Pematang Pasir.

Pada kesempatan ini kami sebagai pemerintah Desa Pematang Pasir mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa yang telah ikut membantu secara aktif, sehingga terwujudnya buku ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran sehingga profil ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami percaya bahwa profil ini tidak hanya menjadi tulisan di atas buku dan pelengkap kepustakaan desa saja, tetapi akan bermanfaat juga bagi desa-desa lainnya, dan dapat merupakan acuan bagi kesinambungan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di desa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha dan program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa Pematang Pasir.

Pematang Pasir, Maret 2001

Kepala Desa



Satiman

SAMBUTAN KETUA BAPPEDA LAMPUNG SELATAN

Kami menyambut baik terbitnya buku Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang, yang telah disusun oleh Proyek Pesisir Lampung dengan partisipasi aktif dari LSM dan masyarakat desa. Buku ini diharapkan akan menjadi penunjang dalam proses pembangunan desa karena di dalam buku ini menggambarkan potensi dan kegiatan utama masyarakat.

Dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang pembagian wewenang pusat dan daerah, maka peranan desa dalam pembangunan akan semakin menentukan dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Demikian halnya dalam pembangunan wilayah pesisir. Oleh karena itu, buku profil ini akan sangat berguna bagi perencanaan pembangunan Desa Pematang Pasir di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan publikasi ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan, Tim Pengarah Propinsi, dan Pokja Pesisir yang telah memberikan perhatian yang besar sejak awal implementasi Proyek Pesisir sampai saat ini.

Kepada perwakilan USAID Indonesia di Jakarta melalui Proyek Pesisir Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi proses penyusunan sampai terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Demikian halnya dengan PKSPL – IPB, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas segala saran, masukan, dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.

Akhirnya, penghargaan disampaikan kepada masyarakat Desa Pematang Pasir dengan harapan semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memacu kita semua untuk melaksanakan pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Pasir.

Terima kasih.

Kalianda, Maret 2001
Ketua BAPPEDA Lampung Selatan



Rusdi Maliki

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	i	4.3 Perekonomian Desa	8
KATA PENGANTAR	ii	4.3.1 Pertanian	8
UCAPAN TERIMA KASIH	iii	4.3.2 Perikanan	9
SAMBUTAN KEPALA DESA	iv	4.3.3 Perdagangan	10
SAMBUTAN KETUA BAPPEDA LAMPUNG SELATAN.....	v	V. ISU-ISU UTAMA	11
DAFTAR ISI	vi	5.1 Lingkungan	11
I. PENDAHULUAN	1	5.2 Status Lahan	12
1.1 Latar Belakang	1	5.3 Pertanian	12
1.2 Tujuan	2	5.4 Perikanan	13
1.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data	2	5.5 Sosial	15
II. PERKEMBANGAN DESA	3	VI. MODEL PENANGANAN ISU	16
2.1 Sejarah Desa	3	6.1 Degradasi Lingkungan Pantai	16
2.2 Struktur Pemerintahan Desa	4	6.1.1 Studi Banding	16
2.3 Sarana dan Prasarana Desa	4	6.1.2 Rehabilitasi Mangrove	16
III KONDISI FISIK WILAYAH	5	6.1.3 Rancangan Peraturan Desa	17
3.1 Geografi dan Administrasi	5	6.2 Sosial Ekonomi Masyarakat	17
3.2 Fisiografi dan Kondisi Tanah	5	6.2.1 Profil Desa	17
3.3 Pemanfaatan Lahan	5	6.2.2 Kelompok Swadaya Masyarakat	18
IV KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL EKONOMI	7	6.2.3 Pendidikan Lingkungan	19
4.1 Kependudukan	7	6.3 Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan	19
4.2 Peranan Kaum Perempuan	7	DAFTAR PUSTAKA	20
		LAMPIRAN	21



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Pematang Pasir terpilih sebagai lokasi pengembangan model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat setelah melalui proses seleksi awal dari 9 (sembilan) desa di Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki wilayah pertambakan tradisional. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, Proyek Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LPSM Yasadhana, Yayasan Mitra Bentala dan Yayasan Alas Indonesia).

Desa Pematang Pasir termasuk dalam wilayah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari lima dusun yaitu Purwosari, Rejosari I, Rejosari II, Sidomukti I, dan Sidomukti II. Desa ini merupakan salah satu desa di wilayah Pantai Timur Lampung yang padat dengan masalah kegiatan pembukaan tambak udang dan masalah abrasi yang parah. Abrasi ini disebabkan ketidakjelasan status lahan dan lemahnya pengawasan jalur hijau sehingga sebagian besar hutan pantai (*mangrove*) dibuka oleh masyarakat menjadi areal tambak.

Penyusunan Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir adalah salah satu proses dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang berbasis masyarakat, yaitu berupa proses pencarian data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada dan berkembang di desa. Profil ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan kegiatan.

Berdasarkan kesepakatan internasional, proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan (Gambar 1). Siklus tersebut terdiri dari lima langkah berikut:

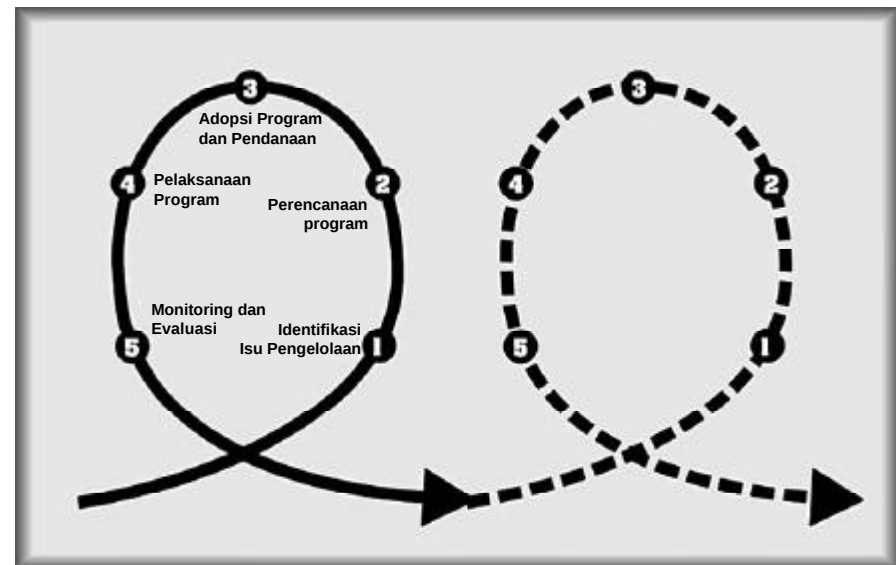
1. Identifikasi isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir
2. Persiapan atau perencanaan program
3. Adopsi program dan pendanaan
4. Pelaksanaan program
5. Monitoring dan evaluasi

Dokumen profil ini merupakan satu langkah awal dari serangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam siklus tersebut.

Pengalaman dunia juga menunjukkan bahwa beberapa langkah di atas harus dilalui apabila ingin mencapai keberhasilan dalam tujuan jangka panjang. Program akan lebih matang dan kuat apabila telah berhasil melewati satu putaran siklus.

Profil desa ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenali potensi diri dan sumberdaya alamnya sehingga mereka dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan potensi yang ada. Dengan meningkatnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desanya diharapkan akan muncul kembali rasa kebersamaan dan kemampuan untuk berswadaya.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan akan sangat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana pembangunan benar-benar



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan profil desa adalah untuk mengetahui kondisi, potensi, dan permasalahan desa sebagai lokasi kegiatan, yang dideskripsikan dalam profil desa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya profil desa ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang senyatanya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun kegiatan bersama dalam usaha membangun Desa Pematang Pasir secara mandiri dan terpadu.

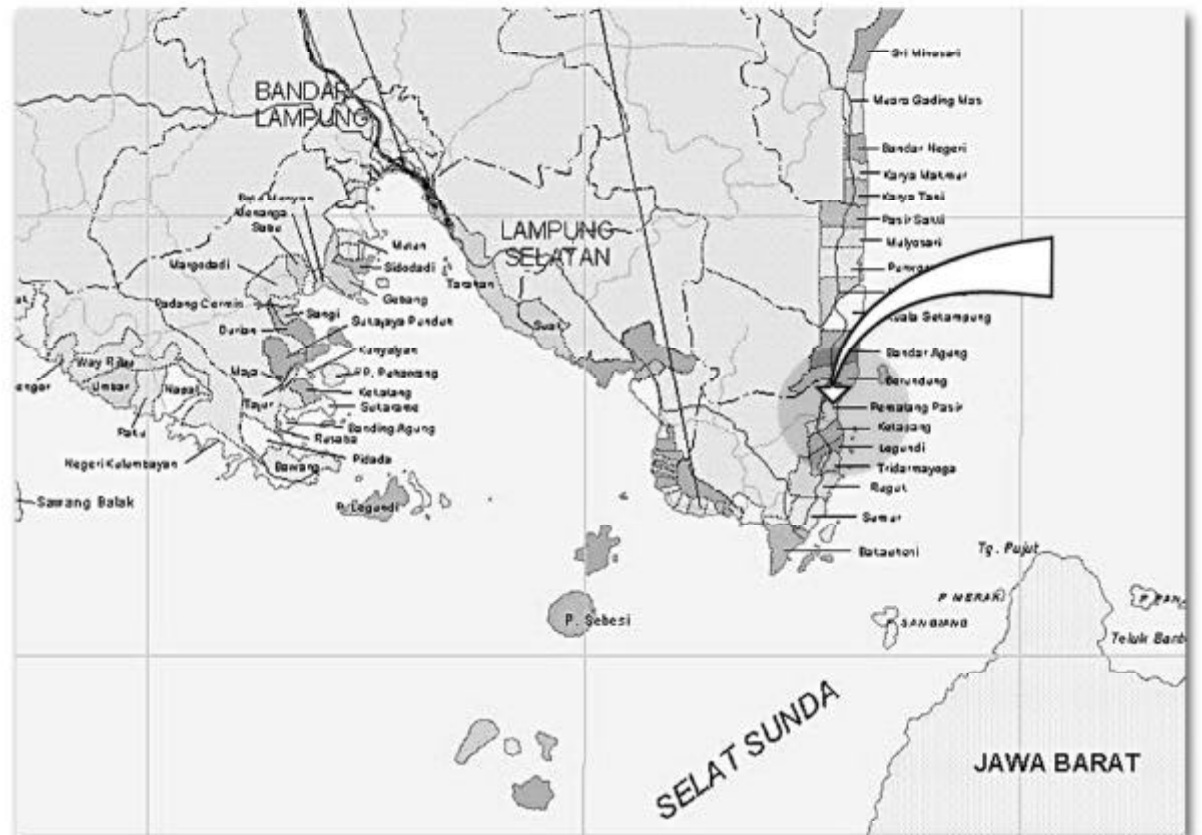
1.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data primer (data diambil langsung dari masyarakat) dan pengumpulan data sekunder dari hasil-hasil penelitian, laporan-laporan teknis, dan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung. Pengumpulan data primer terdiri dari:

- ♦ Pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur atau informal yaitu bertemu langsung dengan masyarakat yang diambil secara random/sampling untuk mendapatkan berbagai informasi tentang permasalahan yang mereka hadapi dalam budidaya pertanian maupun budidaya udang/pertambakan.
- ♦ Pengumpulan data dengan cara pertemuan kelompok, sehingga didapatkan informasi tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam budidaya pertanian maupun budidaya udang, serta permasalahan yang dihadapi secara kelompok.
- ♦ Untuk mendapatkan data statistik (penduduk), luas wilayah, pola pemanfaatan lahan, kepemilikan dan sta-

tus lahan dilakukan dengan pendataan langsung melalui kerjasama dengan Ketua RT di masing-masing dusun.

Data yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian dilakukan verifikasi data dan hasil analisis dengan masyarakat untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya hasil pengolahan dan analisis data dideskripsikan menjadi profil desa.



Gambar 2. Lokasi Desa Pematang Pasir

II. PERKEMBANGAN DESA

2.1 Sejarah Desa

Desa Pematang Pasir menjadi desa definitif relatif masih baru yaitu pada tahun 1993. Sejarah perkembangan terbentuknya desa ini melalui proses kedatangan masyarakat secara swakarsa yang tentu saja sangat berbeda dengan kebanyakan wilayah lainnya di Lampung yang menjadi lokasi proyek transmigrasi.

Menurut penuturan tokoh masyarakat desa yang juga pelopor pembukaan lokasi usaha dan pemukiman di desa ini (Marjono, dkk, 1999), kelompok pendatang pertama berasal dari Wonosobo dan Kota Agung (Kab. Tanggamus) sebanyak 30 KK (Zen, Kadim, dkk). Kedatangan kelompok pertama ini terjadi pada tahun 1972 berdasarkan informasi dari H. Rais (pada saat itu anggota DPRD Propinsi) dan Masrah Saleh (Kades Gayam) kepada masyarakat Wonosobo dan Kota Agung untuk membuka lokasi secara swadaya di wilayah yang sekarang ini termasuk Desa Taman Sari. Pada tahun 1973, ketigapuluh KK tersebut dengan mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp 5.500.- untuk



Jalan desa perbatasan antara permukiman dan lahan tambak

2 ha lahan per KK diizinkan membuka areal baru di Pematang Pasir di bawah koordinasi Yayasan Pembina Umat (YPU) yang pada waktu itu diketuai oleh Yakub Lubis. Pelaksanaan pengukuran lahan dilakukan oleh juru ukur agraria (Tumiri) dan didampingi polisi kehutanan (Silalahi). Pada awal pembukaan lahan, Pematang Pasir masih berupa hutan dan rawa-rawa, dan belum ada jalan yang layak untuk jalur transportasi dengan kendaraan. Tahun berikutnya (1974), gelombang pendatang ke II dari Wonosobo (40 KK) melanjutkan pembukaan lahan untuk pertanian tanaman tahunan dan palawija. Selanjutnya kedatangan petani lebih bersifat perorangan baik berasal dari daerah Lampung sendiri maupun dari Pati (Jateng) dan Kronjo (Jabar).

Pematang Pasir pada awalnya merupakan wilayah Desa Gayam. Masyarakat pendatang yang membuka lokasi di sini dipimpin oleh seorang Kepala Suku (Ramlan Lubis) berkoordinasi dengan YPU sampai YPU bubar pada tahun 1979. Pada tahun 1980, wilayah bukaan baru ini dibagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun 4, 5 dan 6 sebagai bagian dari Desa Gayam. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin kompleksnya aktivitas dan permasalahan masyarakat, terutama menyangkut administrasi pemerintahan, pada tahun 1988 Pematang Pasir ditingkatkan menjadi desa persiapan dan pada tahun 1993 ditingkatkan lagi menjadi desa definitif.

Sebagian wilayah Desa Pematang Pasir termasuk dalam kawasan Proyek Rawa Sragi II untuk areal persawahan, yang pembangunan drainase dan tanggul penangkisnya dilaksanakan tahun 1987 sampai 1988. Bersamaan dengan pembangunan Proyek Rawa Sragi II, pendatang perorangan yang berasal dari Pati dan Kronjo mulai membuka lahan pesisir di luar tanggul penangkis untuk empang bandeng, yang akhirnya juga digunakan sebagai tempat pemeliharaan udang dengan memanfaatkan saluran drainase untuk memasukan air laut. Kegiatan ini bisa dianggap sebagai awal pembukaan jalur hijau di pesisir Desa Pematang Pasir yang sebagian kawasan tersebut juga termasuk Register 1 yang diperuntukkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi. Pelaksanaan *land-reform* Proyek Rawa Sragi II dengan jatah 1 ha pekarangan dan 1 ha sawah tiap KK, untuk wilayah Pematang Pasir tidak disetujui oleh masyarakat dan akhirnya lahan sawah yang sudah dicetak tetap dimiliki oleh pemilik lahan sebelumnya.

2.2 Struktur Pemerintahan Desa

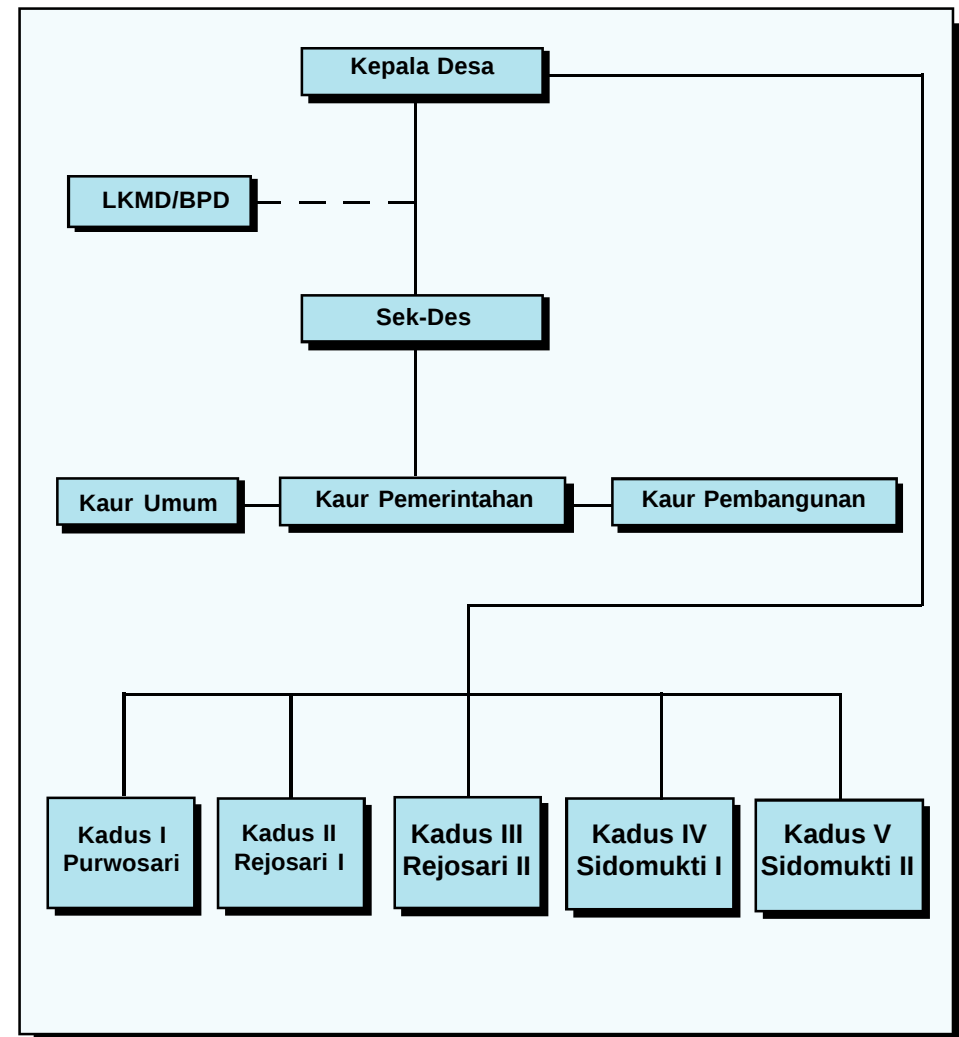
Kelembagaan Desa di Pematang Pasir sudah lengkap sebagaimana di desa-desa definitif lain di Indonesia. Sampai dengan tahun 2000, Ketua LKMD dijabat oleh Dalil, Kepala Desa Satiman (1992-2000), Sekretaris Desa Bambang S., Kepala Urusan Umum M. Sugino, Kepala Urusan Pemerintahan Tugiono, Kepala Urusan Pembangunan Rasimun. Terdapat lima kepala dusun antara lain, Radi sebagai Kadus Purwosari, Santami sebagai Kadus Rejosari I, Kadus Rejosari II Sukarto, Kadus Sidomukti I Sudarno, dan Kadus Sidomukti II Ashari.

2.3 Sarana dan Prasarana Desa

Desa Pematang Pasir dilintasi jalan lintas timur Sumatera (jalan negara sepanjang 9 km) sebagai jalur lintas kedua utama yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa. Jalur ini merupakan jalan baru yang mulai digunakan secara efektif sejak tahun 1993. Jalan dalam desa masih berupa jalan tanah dan sebagian besar bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dan sampai saat ini belum ada peningkatan kualitas jalan dalam desa.

Permukiman penduduk umumnya terdapat di sepanjang jalan raya dan sebagian lainnya pada jalur sebelah Timur sekitar 200 meter sejajar jalan raya. Sejak tahun 1997, pemukiman sepanjang jalan raya yang telah menikmati aliran listrik PLN, sementara yang lainnya belum didukung oleh distribusi aliran listrik.

Sarana lainnya yang sudah ada, yaitu dua Sekolah Dasar Negeri (SDN), dua Madrasah Ibtidaiyah (MI), dua Madrasah Tsanawiyah (MTs), dua Pondok Pesantren, dan satu Taman Kanak-kanak. Sarana ibadah yang ada terdiri dari dua masjid dan mushala di tiap-tiap dusun. Fasilitas kesehatan yang tersedia berupa satu Puskesmas Pembantu dan satu Klinik Kesehatan yang dikelola swasta. Klinik kesehatan ini didukung dokter umum dan dokter spesialis.



III. KONDISI FISIK WILAYAH

3.1 Geografi dan Administrasi

Desa Pematang Pasir merupakan salah satu dari 10 desa di Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini dilalui jalan raya lintas timur dan termasuk wilayah Kecamatan Pembantu Ketapang. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Berunding dan Sidodadi, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumbernadi dan Desa Sidoasih, dan di sebelah Barat dengan Desa Sumber Agung.

Secara administratif Desa Pematang Pasir terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu Purwosari, Rejosari I, Rejosari II, Sidomukti I, dan Sidomukti II. Masing-masing dusun diketuai oleh Kepala Dusun.

3.2 Fisiografi dan Kondisi Tanah

Hampir 85% wilayah Pematang Pasir terletak pada fisiografi Dataran Tuf Masam, dan sisanya merupakan fisiografi Marin. Usaha pertambakan umumnya dilakukan di wilayah berfisiografi Marin tersebut, sedangkan usaha pertanian dilakukan di wilayah berfisiografi Dataran Tuf Masam.

Fisiografi Dataran Tuf Masam didominasi oleh jenis tanah *Kanhapoludults* yang bertekstur agak halus sampai halus, kedalaman tanah sangat dalam, drainase baik, kesuburan tanah rendah sampai sangat rendah, kapasitas tukar kation tanah rendah sampai sangat rendah, dan reaksi tanah masam sampai sangat masam.

Fisiografi Marin (dataran pantai) sebagian terdiri dari jenis tanah *Hydraquents* yang bertekstur tanah halus, kedalaman tanah sangat dalam, drainase sangat buruk, kesuburan tanah sangat rendah, kapasitas tukar kation tanah sangat rendah, dan reaksi tanah sangat masam. Sebagian lagi wilayah ini terdiri dari jenis tanah yang bertekstur kasar, kedalaman tanah sedang sampai dalam,

drainase kadang-kadang berlebihan, kesuburan tanah rendah, kapasitas tukar kation tanah rendah, dan reaksi tanah sangat alkalin. Curah hujan di daerah Pematang Pasir berkisar antara 1750 mm/th sampai 2250 mm/th.

Menyimak kondisi lingkungan fisik wilayah Pematang Pasir, dapat dikemukakan bahwa lahan-lahan yang terletak di wilayah fisiografi marin lebih cocok untuk pengembangan pertambakan, sedangkan areal yang terletak di wilayah fisiografi dataran tuf masam dapat digunakan untuk pengembangan tanaman pangan seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau, tanaman sayuran seperti ketimun, bawang daun, bawang merah, buncis, kacang panjang, cabai, tomat, bayam, serta buah-buahan dataran rendah seperti nenas, pisang, pepaya, melon, semangka, belimbing.

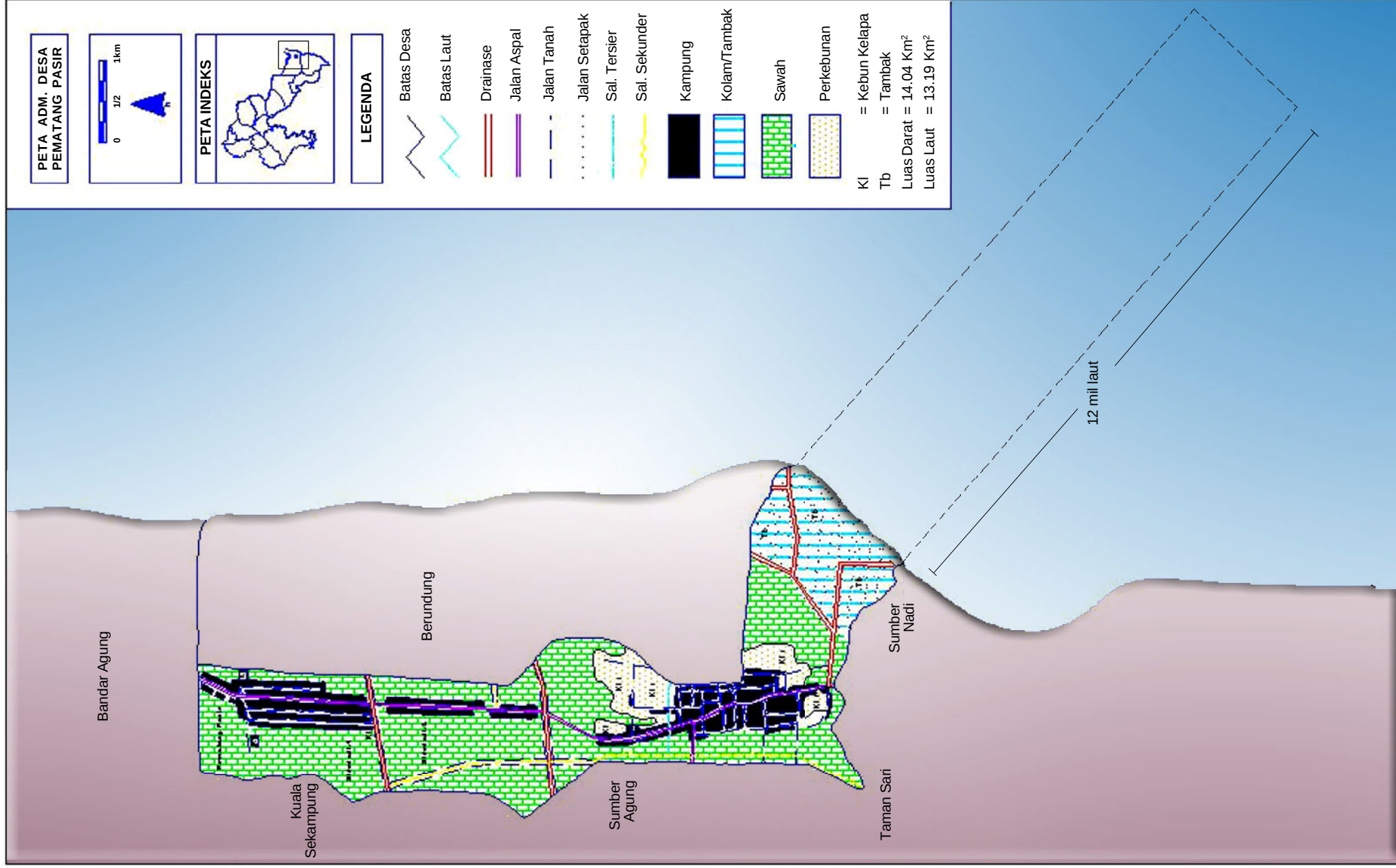
Namun demikian di dalam pengelolaannya, karena wilayah ini tingkat kesuburan dan kandungan bahan organiknya sangat rendah, diperlukan pemupukan dan penambahan bahan organik dengan pupuk kandang atau pemberian mulsa. Pemberian mulsa sangat dianjurkan karena wilayah ini kondisi curah hujannya relatif rendah dan tidak merata. Oleh karena itu, pengembangan persawahan di wilayah ini mengalami kendala ketersediaan air, baik air hujan maupun irigasi (Wiryawan, B., 1999).



Tanaman cabai sebagai alternatif usaha tani masyarakat

3.3 Pemanfaatan Lahan

Luas lahan Desa Pematang Pasir 11,20 km² atau 1120 ha (Data Kecamatan). Lahan tersebut dimanfaatkan untuk persawahan (42,166%), pertambakan (18,71%), perladangan (5,951%), dan perumahan/pekarangan (33,175%). Lahan pekarangan atau perladangan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanam pohon kelapa, pisang serta tanaman lainnya. Di areal persawahan ditanam padi, bawang merah, tomat, dan sayur-mayur, sedangkan pada areal pertambakan selain ditebar udang juga dipelihara ikan bandeng. Lihat Peta Administrasi Desa.



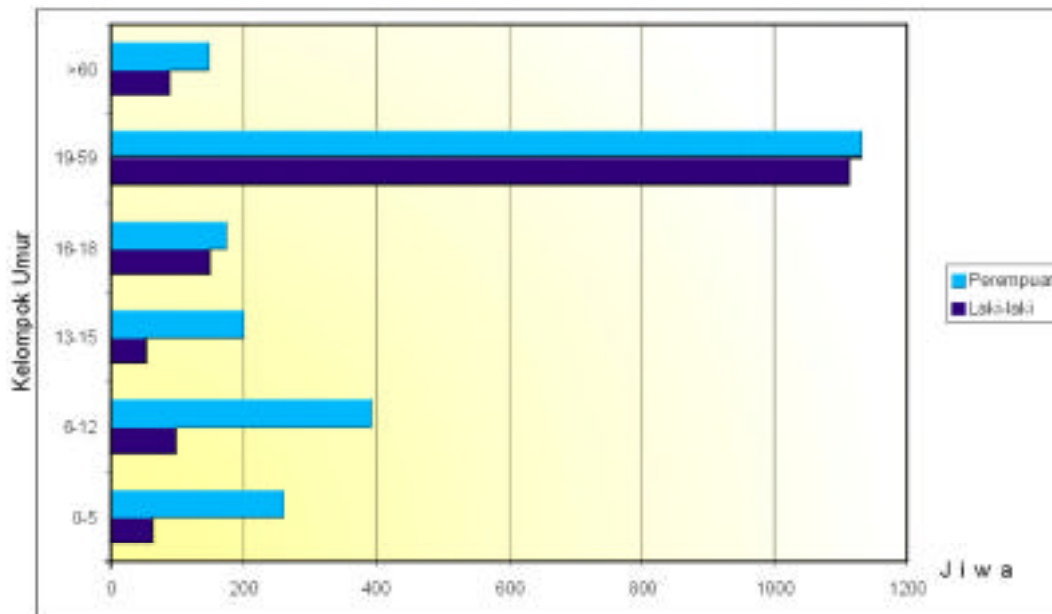
Gambar 4. Peta administrasi dan pemanfaatan lahan Desa Pematang Pasir.

IV. KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL EKONOMI

4.1 Kependudukan

Penduduk Desa Pematang Pasir berjumlah 4.542 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.342 jiwa (51,57%) dan perempuan 2.200 jiwa (48,43%), sehingga seks rasionya sebesar 106,48. Dari jumlah penduduk tersebut yang termasuk dalam usia produktif (usia 19-59 tahun) sebanyak 3.848 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 2580 jiwa dan perempuan sebanyak 1268 jiwa. Grafik kondisi penduduk tertera pada Gambar 3, dan gambaran penduduk secara keseluruhan tertera pada Lampiran.

Warga Desa Pematang Pasir yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 34,4%, Sekolah Menengah Pertama 7,4%, Sekolah Menengah Umum sebesar 4,1%, D-1 dan D-2 0,2%, Diploma III 0,1%, dan yang berpendidikan Strata I 0,2%.



Gambar 5. Kondisi Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Sebagian besar penduduk Pematang Pasir bekerja sebagai petani dan petambak. Di samping itu ada juga yang bekerja sebagai buruh, guru, pegawai negeri sipil, dan nelayan. Dari jumlah total kepala keluarga (1031 KK), ternyata 80,21 % adalah petani, 4,85% adalah petambak, dan lain-lain 14,94% (guru, dagang, buruh, PNS, dll.).

Penduduk Pematang Pasir 84% berasal dari Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur), Sunda sebanyak 9%, dan dari daerah lainnya seperti Batak, Betawi, Banten, Bugis, Palembang, Padang, Madura, dan Cina sebanyak 7%.

Budaya yang dominan di Pematang Pasir adalah budaya etnis Jawa, karena 84% warganya berasal dari etnis Jawa. Kewajiban sosial yang menjadi tradisi di Pematang Pasir antara lain menyumbang seseorang yang sedang melaksanakan hajatan (pernikahan, kelahiran, khitanan, pindah rumah, dll). Sumbangan kaum laki-laki berupa uang, sedangkan kaum perempuan biasanya menyumbang bahan-bahan pokok (beras, mie, kecap, gula, roti, ayam) ditambah dengan uang atau berupa kado. Tradisi ini kadang-kadang menjadi beban sosial bagi masyarakat, apalagi saat musim panen gagal, sehingga mereka rela menghutang kepada orang lain untuk keperluan menyumbang tersebut (Darmastuti dan Rochana, 2000).

Selain tradisi di atas, masyarakat Desa Pematang Pasir mempunyai tradisi bersih desa (Suro'an) yang dirayakan dengan menggelar acara budaya Wayang Kulit yang sebelumnya didahului dengan acara Ruwatan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun.

Kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan masyarakat adalah arisan ibu-ibu (tiap hari Kamis), kelompok tani (tiap 6 bulan), yasinan bapak-bapak (tiap hari Jum'at), arisan bapak-bapak (tiap 6 bulan), yasinan ibu-ibu (tiap hari Kamis), dan shalawatan (tiap hari Jum'at kliwon).

4.2 Peranan Kaum Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian Ari Darmastuti dan Erna Rochana (2000), tentang Profil Potensi, Peran dan Sumbangan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat di Pematang Pasir, antara

lain didapatkan bahwa perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di desa, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan desa hampir tidak ada.

Tingkat pendidikan perempuan (rata-rata SLTP) lebih rendah dari kaum laki-laki (rata-rata SMU). Bekal keterampilan yang dimiliki perempuan, seperti membuat makanan, menjahit, menjadi dukun, buruh pabrik, dan lain-lain.

Industri rumah tangga pada umumnya ditangani oleh kaum perempuan, seperti pembuatan keripik pisang dan singkong, makanan gorengan, tempe, kelanting, dan lain-lain. Sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga sangat bervariasi mulai dari tidak memberikan sumbangan sampai dengan yang penghasilannya lebih besar dari kaum laki-laki, dan ternyata hal ini tidak menjadikan beban psikologis dalam hubungan keluarga. Di samping itu perempuan melakukan *Survival strategy* dengan berbagai cara, antara lain pinjam meminjam uang, gadai, mengambil barang di toko untuk dibayar kemudian bagi keperluan khusus, berhutang pada pedagang keliling, memutar uang kas



Kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-kanak Al Muhajirin

yasinan/pengajian, memelihara ternak dan menanam sayuran di rumah, selain melakukan kegiatan ekonomi utama.

Lembaga-lembaga yang berperan di desa dan secara nyata mempengaruhi kehidupan perempuan antara lain yasinan (lembaga informal keagamaan), arisan, “sambatan”, rukun kematian (sosial ekonomi), “sumbangan”, puskesmas, posyandu dan Griya Husada (kesehatan), Yayasan Al-Muhajirin dan Al-Ma’arif (pendidikan).

4.3 Perekonomian Desa

4.3.1 Pertanian

Kegiatan utama pertanian di Desa Pematang Pasir adalah usahatani maupun padi sawah dan sayuran (cabai, bawang merah). Persawahan di Desa Pematang Pasir merupakan sawah yang dicetak oleh Proyek Rawa Sragi II tahun 1984 - 1986. Lahan tersebut sebelumnya adalah rawa-rawa yang cukup dalam, kemudian di bagian folder (tanggul) dan saluran drainase untuk mengatur kelebihan air.

Lahan sawah di Desa Pematang Pasir adalah sawah tadah hujan, sehingga penanaman padi hanya dilaksanakan pada musim hujan. Selama musim hujan (bulan November sampai bulan Mei) petani dapat melaksanakan dua kali tanam padi. Tanam kedua biasanya merupakan spekulasi petani bahwa hujan terakhir masih turun untuk membasahi lahan mereka. Namun sejak dua tahun terakhir ini akibat terjadinya perubahan musim petani kesulitan untuk menentukan saat yang tepat untuk mulai mengolah tanah. Umumnya pengolahan tanah dimulai bila air diperkirakan sudah cukup memadai untuk mulai mengolah dan menanam padi. Sebelum terjadi perubahan musim tersebut biasanya petani dapat menentukan saat tanam dengan melihat bintang dan membuat perhitungan tradisional Jawa berdasarkan ‘mongso’.

Pada musim kemarau sebagian kecil masyarakat menanam tanaman sayuran seperti bawang merah, dan cabai. Sedikitnya petani yang menanam tanaman sayuran karena lahannya jauh dari sumber air, atau karena tingginya harga bibit, pupuk, dan obat-obatan.

Dalam keadaan tidak kekurangan air (normal) produksi padi per hektar rata-rata 3 – 4 ton, sedangkan produksi bawang merah rata-rata 2 – 2,5 ton per ha, dan cabai dapat mencapai 1 – 2 ton per ha.

Kondisi perekonomian masyarakat petani sawah banyak dipengaruhi oleh keberadaan petambak. Pengaruh positif yang dapat dirasakan oleh petani sawah yaitu mereka bisa mendapatkan uang dari upah menjadi buruh di tambak pada saat sawahnya tidak bisa digarap karena kemarau. Sedangkan pengaruh negatif yang dirasakan yaitu kesulitan untuk mendapatkan buruh yang mau bekerja di sawah karena upahnya lebih rendah dari upah buruh tambak, sehingga orang lebih suka menjadi buruh di tambak dibanding dengan untuk menjadi buruh di sawah. Pengaruh negatif lainnya adalah mahalnya harga saprotan (insektisida, pestisida, pupuk) karena banyak yang digunakan oleh para petambak yang berani membeli dengan harga mahal.

Sebagai akibat kondisi pertanian yang belum dapat diandalkan sepenuhnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, maka di Pematang Pasir ada kira-kira 50 orang petani yang ikut membuka lahan baru untuk bertani di daerah Pasiran (Tulang Bawang-dekat Bratasena). Ada juga yang beralih menjadi pekerja bangunan, tukang ojek, buruh tambak, atau kegiatan apa saja yang bisa menghasilkan uang untuk bertahan hingga musim panen tiba.

Seperti petani di daerah lain, petani di Pematang Pasir pun sering mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilainya lebih banyak merugikan petani. Seperti misalnya akibat dicabutnya subsidi pupuk, menyebabkan harga pupuk menjadi mahal, sementara harga hasil-hasil pertanian lebih rendah sehingga nilai tukar petani menjadi lebih rendah lagi.

Dalam menghadapi kondisi pertanian yang demikian sulit, para petani di Pematang Pasir hingga saat ini hanya menghadapi masalah tersebut dengan caranya sendiri-sendiri. Sampai saat ini belum ada kelompok yang mampu berkembang untuk menghadapi masalah-masalah yang ada secara bersama-sama dalam satu garis perjuangan - membangkitkan nasib petani dan menuju kemandirian.

4.3.2 Perikanan

Sumber ekonomi utama masyarakat Pematang Pasir sekarang ini bergantung pada hasil budidaya udang dan bandeng. Areal budidaya mereka tidak hanya terbatas dalam wilayah desa tetapi juga di desa tetangga dan bahkan sampai di Rawajitu dan Sumatera Selatan. Semakin baiknya lintas timur sebagai



Usaha penangkapan ikan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat setempat

jalur transportasi (1994) dan pelabuhan penyeberangan Bakauheni (1980), telah memberi manfaat secara langsung pada masyarakat Pematang Pasir untuk meningkatkan perekonomian mereka seperti menjadi pedagang pengumpul hasil tambak udang, bandeng, penyedia sarana produksi perikanan, dan kebutuhan sehari-hari. Penurunan kualitas lingkungan lahan tambak dalam hal ini untuk budidaya udang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tanpa diikuti dengan peningkatan sikap dan pemahaman masyarakat untuk pengelolaan wilayah pesisirnya secara terpadu, suatu saat akan berdampak buruk pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Pematang Pasir.

Luas lahan tambak di Desa Pematang Pasir sekitar 88,83 ha yang terletak di antara Parit I dan Parit II dan sering disebut dengan nama "Kukap". Selain itu ada juga warga yang memiliki tambak di wilayah Desa Berundung antara Parit II dan Parit V.

Sebagian tambak Desa Pematang Pasir saat ini statusnya sebagai lahan sawah (dalam tanggul penangkis Proyek Rawa Sragi II) dan sebagian yang berada di luar tanggul penangkis sampai saat ini masih berstatus lahan Register 15 Hutan Produksi Terbatas yang dikuasai Dinas Kehutanan.

Produksi tambak di Desa Pematang Pasir rata-rata 2 kwintal/musim per ha setiap kali panen dalam kondisi normal. Dalam satu tahun dapat dilakukan tiga kali siklus. Keberhasilan tambak masih rendah, rata-rata hanya 30 % setiap tahunnya.

Udang yang berasal dari petambak langsung ditampung oleh pembina yang berperan juga sebagai penampung. Penampung ini bisa langsung mengirim udang kepada eksportir di Jakarta atau di Jawa Timur (Banyuwangi). Selain penampung besar seperti tersebut di atas, adapula pengumpul kecil yang menampung udang dari pelele/bakul yang menjual udang hasil “njrupung” atau “leles” yaitu udang sisa panen di tambak yang tertinggal. Para penampung kecil ini kemudian menghubungi pengumpul besar/penampung baik yang ada di desa maupun yang berada di Bandar Lampung.



Kegiatan pemanenan tambak secara tradisional



Ojek, salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat

4.3.3 Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan yang terdapat di Desa Pematang Pasir relatif cukup lengkap dan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. Toko-toko penyedia kebutuhan harian, elektronik, bahan bangunan maupun untuk sarana produksi pertanian dan perikanan yang terkonsentrasi dan menjadi pusat keramaian terdapat di desa ini.

Lokasi pasar yang berada sebelah barat jalan raya, secara administratif terletak di Desa Sidoasih, tetapi secara umum dikenal oleh masyarakat sebagai pasar Pematang Pasir. Sebagai lokasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan transaksi hasil pertanian dan perikanan, pasar Pematang Pasir memiliki tiga hari pasaran, yaitu Minggu, Rabu, dan Jumat.

Hasil produksi budidaya perikanan tambak (bandeng dan udang) merupakan komoditi perdagangan utama di desa ini. Pedagang pengumpul hasil panen udang dan bandeng tidak hanya mengumpulkan hasil panen dari desa sekitarnya, tetapi juga berasal dari Rawajitu dan Sumatera Selatan yang selanjutnya dikirim ke Jakarta atau ke tempat lain di Pulau Jawa untuk pengolahan lebih lanjut sebagai komoditi ekspor.

V. ISU-ISU UTAMA

5.1 Lingkungan

Wilayah timur Desa Pematang Pasir yang berbatasan dengan pantai adalah wilayah pasang surut. Wilayah ini pada awal tebang digunakan oleh pembuka lahan sebagai lahan sawah, namun karena adanya intrusi air laut, maka lahan tersebut menjadi tidak sesuai untuk tanaman padi. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab banyak petani yang menelantarkan lahan sawahnya. Bahkan setelah dibangun tanggul penangkis dan saluran pengeringan (*drainase*), salinitas masih terlalu tinggi bagi tanaman padi, sehingga lahan sawah tersebut menjadi lahan tidur. Kemudian setelah adanya pendatang dari Kronjo (Serang) yang melihat lahan tidur tersebut lalu memanfaatkannya untuk empang ikan liar. Pendatang lain dari Pati mulai memanfaatkan lahan ini sebagai tambak udang/bandeng.

ISU 1 : Hilangnya jalur hijau (*green belt*) di wilayah pesisir

Sebab

- Konversi hutan mangrove di sempadan pantai menjadi tambak
- Pemanfaatan tanah timbul menjadi tambak secara tidak legal

Akibat

- Kualitas perairan buruk
- Ekosistem mangrove terganggu
- Erosi pantai semakin meningkat
- Hasil tambak menurun dan usaha budidaya tidak langgeng
- Hasil tangkapan nelayan berkurang

Melihat hasil dan harga yang menjanjikan, maka makin banyak pendatang yang menyewa lahan untuk membuat tambak budidaya udang windu. Meningkatnya harga udang windu menarik begitu banyak orang untuk memanfaatkan lahan sampai keluar batas tanggul penangkis yang seyogyanya merupakan sabuk hijau (*green belt*). Pembabatan hutan mangrove ini tanpa disadari telah mengakibatkan pantai menjadi rentan terhadap gerusan ombak, sehingga terjadi erosi pantai yang parah dan telah memakan beberapa petak tambak, terutama pada musim timur. Petambak yang tidak dapat meneruskan usahanya, umumnya akan meninggalkan lahan yang telah rusak dengan cara menjual kembali. Uang yang didapat akan digunakan untuk membuka lahan baru di tempat lain, seperti Tulang Bawang sampai Jambi.

ISU 2 : Adanya perubahan garis pantai akibat erosi dan sedimentasi

Sebab

- Gelombang besar pada musim timur
- Penebangan mangrove, sehingga tidak ada lagi pelindung pantai alami
- Penggarapan tanah timbul tidak berwawasan lingkungan

Akibat

- Pantai hilang dan asset masyarakat/tambak/sawah terancam
- Rusaknya tambak dan hilangnya mata pencaharian petambak
- Ancaman terhadap intrusi air laut terhadap sawah

Erosi pantai yang terjadi di Desa Pematang Pasir dan sepanjang pantai timur Propinsi Lampung merupakan akibat ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak Dinas Kehutanan dan Dinas terkait lainnya memperparah keadaan di wilayah Pantai Timur. Ketidaktegasan dalam pengawasan mengakibatkan penebang-penebang liar dari luar Desa Pematang Pasir ikut membuka areal sabuk hijau untuk tambak dan selanjutnya dijual karena harganya yang tinggi.

Para petambak yang memiliki lahan di wilayah sabuk hijau sebenarnya mengetahui bahwa lahan tersebut milik negara, namun tidak adanya ketegasan dari Dinas Kehutanan mengakibatkan mereka bersikap masa bodoh, selain itu para petambak ini juga memperoleh surat garapan dari aparat desa.

ISU 3 : Belum adanya kesepakatan masyarakat tentang konservasi wilayah pesisir

Sebab

- Konflik pemanfaatan lahan
- Kurang jelasnya pembagian tanggung jawab antara Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

Akibat

- Rusaknya ekosistem pesisir
- Erosi pantai semakin meningkat
- Ketegangan antar masyarakat
- Kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumberdaya yang ada
- Potensi sumberdaya pesisir belum dimanfaatkan secara optimal

5.2 Status Lahan

Berdasarkan hasil penelitian Akib dan Heryandi (2000) mengenai aspek hukum pengelolaan wilayah pesisir, didapatkan bahwa sebagian masyarakat Pematang Pasir mengetahui perlunya bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah), akan tetapi pengetahuannya terhadap kebijakan peruntukan tanah masih sangat rendah, demikian halnya pengetahuan masyarakat tentang pengaturan pelestarian wilayah pesisir.

Secara vertikal, berbagai peraturan yang mengatur wilayah pesisir pada tingkat nasional tidak bertentangan satu sama lain, tetapi secara substansial ada beberapa ketidakjelasan instansi berwenang. Peraturan masing-masing sektor terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir belum selaras dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya telah meletakkan wewenang pengelolaan sumberdaya alam dan tanggung jawab pelestarian lingkungan.

Isu 4: Ketidakjelasan status lahan

Sebab

- Pengetahuan kebijakan pemilikan tanah rendah
- Ketidakjelasan instansi yang berwenang
- Peraturan sektor tentang pengelolaan wilayah pesisir belum terkait dengan UU No. 22/1999
- Peraturan tentang peran serta masyarakat masih rendah

Akibat

- Status pemilikan lahan tidak kuat
- Kondisi lingkungan pesisir rusak
- Rusaknya sempadan pantai

Dari 88 peraturan tingkat nasional dan 44 peraturan tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, hanya 20 peraturan yang mengatur peran serta masyarakat. Peraturan dan kebijaksanaan yang berlaku saat ini pada semua sektor pada umumnya dibuat dengan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan/sumberdaya alam dan kepentingan masyarakat sekitar, sehingga dalam pelaksanaannya cenderung tidak efektif.

Desa Pematang Pasir terletak pada daerah register 1, yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas di bawah Dinas Kehutanan. Untuk wilayah daratan (pekarangan/persawahan) sebagian telah bersertifikat dan sebagian lagi belum mendapat sertifikat. Untuk lahan tambak yang berasal dari sawah yang beralih fungsi menjadi tambak, baik yang ada di dalam maupun di luar tanggul penangkis proyek Rawa Sragi, sampai saat ini belum ada kejelasan status pemanfaatan dan kepemilikan lahannya. Oleh karena itu belum ada sertifikat.



Pembukaan tambak di jalur hijau (green belt) masih sering dilakukan

5.3 Pertanian

Isu utama yang ditemui di bidang pertanian adalah saat tanam yang tidak serempak karena saling menunggu saat hujan turun dan tanah cukup basah untuk tebar benih. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pengaturan air dan pemberantasan hama. Petani sering pula mengalami keterlambatan tanam akibat saling menunggu tersebut. Di Pematang Pasir belum ada aturan bersama dalam satu hamparan sawah untuk menanam bersama-sama.

Saluran pengeringan rawa (Rawa Sragi) yang diharapkan petani dapat membantu meningkatkan hasil pertanian, ternyata fungsinya kurang optimal. Saat ini banyak pintu-pintu air yang rusak, sedangkan di saluran pengeringan terjadi sedimentasi, dan hal tersebut mengakibatkan sawah tergenang pada musim hujan.

ISU 5 : Kekurangan air untuk pertanian padi sawah

Sebab

- Tidak adanya sumber air dari sungai

Akibat

- Pertanian hanya mengandalkan sistem tadah hujan dengan produksi yang rendah

Masalah lain yang dihadapi oleh para petani adalah modal tanam dan tingginya harga pupuk serta obat-obatan. Bagi petani di Desa Pematang Pasir yang baru saja mengalami gagal panen dalam 3 (tiga) kali musim tanam, modal tanam menjadi kendala utama bagi mereka mengingat hutang yang kian menumpuk.

Ketergantungan petani di Desa Pematang Pasir terhadap air hujan menyulitkan petani untuk menanam tanaman alternatif saat musim kemarau. Umumnya para petani menjadi buruh bangunan atau buruh tambak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai musim hujan berikutnya. Bagi petani yang menanam palawija selama musim kemarau, biasanya kesulitan yang ditemui adalah menentukan tanaman yang tepat sehingga pada saat panen dapat memperoleh harga yang memadai. Hal tersebut ditunjang pula oleh belum adanya upaya untuk mencari informasi harga komoditas pertanian dan menjualnya ke daerah yang harga jualnya lebih baik.

ISU 6: Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan

Sebab

- Tidak adanya upaya rehabilitasi bekas galian pasir
- Penambangan pasir yang tidak beraturan
- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan

Akibat

- Lahan pekarangan terbengkalai dan tidak produktif
- Banyaknya genangan air sebagai sarang nyamuk

5.4 Perikanan

Setelah lebih dari 10 tahun membudidayakan tambak udang, saat ini para petambak mulai merasakan bahwa produksi tambak sangat menurun. Bahkan usaha tambak mereka sering terancam gagal baik karena kualitas air yang makin rendah maupun makin sulitnya memberantas penyakit.

ISU 7 : Menurunnya kualitas air di pesisir dan tambak

Sebab

- Hilangnya mangrove sebagai filter alami
- Penggunaan racun dalam budidaya tambak
- Macetnya saluran pasokan air laut
- Menumpuknya limbah organik dan residu racun di tambak dan pesisir
- Kurangnya kerjasama antar petambak dalam pengelolaan air dan teknik budidaya
- Terjadinya erosi pantai

Akibat

- Menurunnya hasil tambak
- Menyebarnya penyakit udang/ikan
- Macetnya usaha budidaya tambak
- Kurangnya hasil tangkapan nelayan

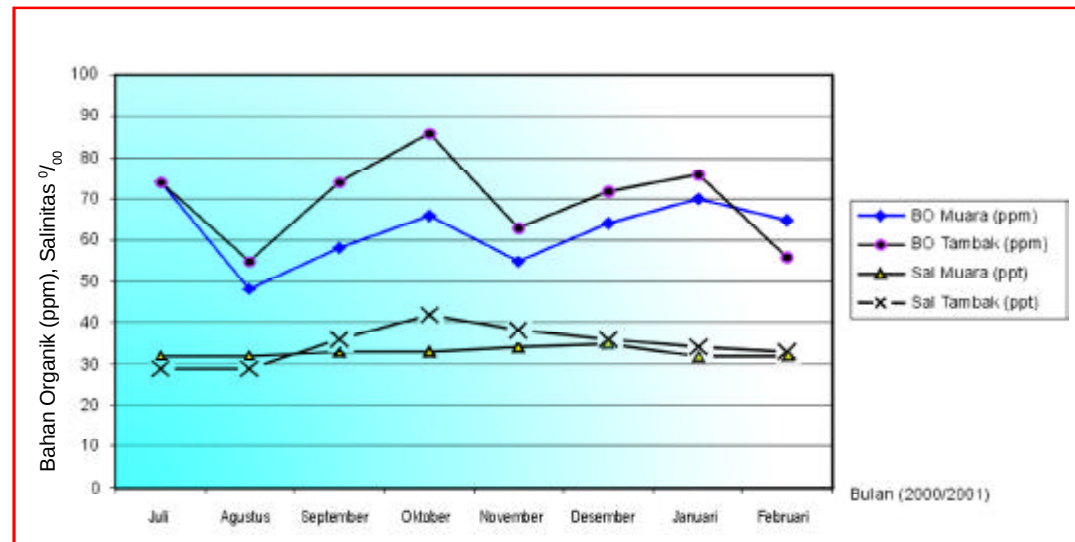
Pencemaran yang terjadi di Pantai Timur sudah cukup tinggi. Pencemaran ini berasal dari pabrik-pabrik di daerah hulu yang membuang limbahnya di sungai-sungai yang bermuara di Pantai Timur, dan dari limbah buangan tambak sendiri. Tambak semi intensif (tradisional plus) dan intensif yang dimiliki oleh masyarakat di sepanjang Pantai Timur biasanya tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang cukup baik. Air limbah dibuang begitu saja sehingga semua sisa bahan organik, obat-obatan, dan penyakit mencemari air laut di sepanjang Pantai Timur. Hal ini diperparah dengan hilangnya hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyaring atau filter bagi bahan-bahan buangan tersebut.

Saluran air masuk dan keluar yang menjadi satu ditambah dengan tidak adanya aturan pembuangan dan pemasukan air di kalangan petambak makin memperburuk kondisi pertambakan di wilayah ini.

Tingginya harga udang dan hutang kepada pembina mendorong petambak untuk berproduksi lebih dari 2 (dua) siklus per tahun. Hal ini mengakibatkan

kesuburan lahan cepat menurun akibat tidak ada jeda yang memberikan kesempatan penguraian berbagai bahan organik yang tersisa dan juga untuk memutuskan siklus hidup penyakit.

Kendala yang dirasakan petambak dalam usaha budidaya udang, antara lain: a) udang stres terserang penyakit; b) kesulitan mendapatkan air tawar; c) pola pengaturan air yang masih semrawut; d) erosi pantai. Permasalahan tersebut sangat berhubungan dengan kondisi alam dan lingkungan Pematang Pasir sendiri. Desa Pematang Pasir tidak dilewati sungai besar yang mampu menyediakan air tawar baik untuk pertanian maupun pertambakan, sehingga pada saat musim kemarau, terjadi peningkatan salinitas secara tajam sebagai akibat penguapan air laut (40 – 45 ppt). Kondisi tersebut mengakibatkan udang mengalami stres yang membuatnya sangat rentan terserang penyakit. Kondisi ini diperparah lagi oleh sistem saluran air masuk dan keluar yang menyatu tanpa ada aturan antar petambak untuk menginformasikan kapan saat memasukkan air dan kapan saat mengeluarkan air. Selain itu, ada kebiasaan



Gambar 6. Grafik rata-rata bulanan konsentrasi bahan organik dan salinitas di lokasi tambak percobaan.

ISU 8: Menurunnya hasil tangkapan nelayan

Sebab

- Hilangnya habitat ikan yaitu hutan mangrove
- Pengeboman ikan oleh nelayan luar
- Menurunnya kualitas perairan pesisir

Akibat

- Stok ikan/udang alami menjadi langka
- Penghasilan nelayan turun

petambak untuk meletakkan lumpur organik dari dasar tambak ke atas tanggul. Kedua hal tersebut sangat memudahkan terjadinya penularan penyakit dari satu tambak ke tambak lainnya. Kedua hal tersebut merupakan kerugian dari sistem tanam yang tidak serempak.

Hilangnya hutan mangrove juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air mengingat fungsi mangrove sebagai penyaring atau filter yang menyerap bahan-bahan organik dan inorganik yang berasal dari tambak maupun sawah. Polusi bahan organik dan inorganik yang berasal dari tambak ini terjadi secara menyeluruh di sepanjang Pantai Timur, sehingga air yang berada di sekitar pantai pun secara keseluruhan sudah tercemar. Dengan demikian, petambak tradisional maupun semi intensif yang mengandalkan pasokan air saat pasang surut hanya mendapatkan air berkualitas rendah yang berasal dari buangan tambak.

Hilangnya hutan pantai ini juga mengakibatkan erosi pantai, yang sejak tahun 1980-an telah sekitar 1 km lahan pantai Desa Pematang Pasir hilang karena erosi ini. Beberapa tambak yang langsung berdekatan dengan pantai hilang tergerus air. Adanya oknum yang menebang mangrove dan membuka tanah timbul untuk tambak justru mempercepat erosi pantai tersebut, bahkan merusak kembali hasil reboisasi mangrove.

Selain pertambakan, usaha lain yang dilakukan oleh sebagian kecil penduduk Desa Pematang Pasir adalah menangkap ikan. Penangkap ikan ini dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu penjala dan nelayan perahu.



Salah satu hasil tangkapan nelayan

Pada umumnya penjala tidak memiliki perahu dan mereka biasanya menangkap ikan di saluran-saluran tambak maupun di tepi pantai dengan menggunakan jala atau sudu. Nelayan perahu adalah penangkap ikan yang menangkap ikan dengan perahu di perairan sekitar Desa Pematang Pasir dan Pulau Mundu. Umumnya satu perahu digunakan bersama-sama oleh satu kelompok nelayan. Alat tangkap yang digunakan umumnya pancing dan jala tancap. Di Desa Pematang Pasir, jumlah penjala dan nelayan perahu ini masing-masing sekitar 25 orang.

Masalah yang mereka hadapi saat ini adalah rendahnya hasil tangkapan akibat hilangnya mangrove serta penangkapan ikan dengan bom dan trawl. Selain itu sulitnya mengembangkan usaha dengan alat yang lebih baik dan kurangnya informasi mengenai upaya-upaya pengembangan usaha yang ada dan usaha alternatif lainnya.

5.5 Sosial

Bila diperhatikan, kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah desa adalah kurangnya kebersamaan dan komunikasi baik

antara aparat desa dan masyarakat maupun di antara masyarakat sendiri. Musyawarah masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kurang aktif. Masyarakat nampaknya kurang memiliki inisiatif untuk mencoba mengatasi masalah dan sangat tergantung kepada perintah dari aparat desa untuk menggerakkan mereka.

Kelompok-kelompok yang ada, baik kelompok keagamaan maupun kelompok tani dan kelompok usaha lainnya masih belum berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk membahas berbagai masalah desa. Kelompok tani maupun koperasi yang ada umumnya dibentuk untuk mendapatkan bantuan dana dari luar. Akibatnya, masyarakat kehilangan kemampuan untuk berswadaya mengembangkan usaha dari dalam kelompok sendiri.

ISU 9: Rendahnya komunikasi antar masyarakat dalam pembangunan desa

Sebab

- Kurangnya kegiatan rembug desa dan musyawarah desa
- Kurangnya motivator pembangunan di desa

Akibat

- Program-program pembangunan di desa kurang
- Perhatian pemerintah kabupaten kurang terhadap pembangunan Desa Pematang Pasir



Pertemuan masyarakat dengan Pemda dan DPR RI

VI. MODEL PENANGANAN ISU

Selama masa kegiatannya, Tim Pantai Timur (Proyek Pesisir dan mitra kerja LSM Yasadhana) dan Pemda Lampung Selatan telah mencoba menangani beberapa masalah yang terjadi di Desa Pematang Pasir. Masalah-masalah yang telah ditangani tersebut antara lain:

6.1. Degradasi Lingkungan Pantai

Terjadinya abrasi dan sedimentasi di wilayah pantai Desa Pematang Pasir telah mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan lahan tambak. Untuk mengatasi masalah ini beberapa cara telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan studi banding, rehabilitasi mangrove di areal pantai, dan pembuatan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan kawasan pantai.

6.1.1 Studi Banding

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2000 yang diikuti oleh 30 orang, yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan petambak dari 3 desa (Sumber Nadi, Pematang Pasir, dan Berunding). Lokasi kegiatan



Rehabilitasi mangrove yang dilakukan masyarakat

dipilih di wilayah Pantai Utara Jawa yang memiliki kondisi alam dan permasalahan yang hampir sama dengan kondisi Pantai Timur Lampung. Lokasi studi banding antara lain Indramayu, Pemalang, dan Banyuwangi.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka wawasan peserta mengenai permasalahan dan penanganan kerusakan lingkungan akibat cara pemanfaatan yang kurang bertanggung jawab (Wiryawan, Susanto, dan Khazali, 2000).

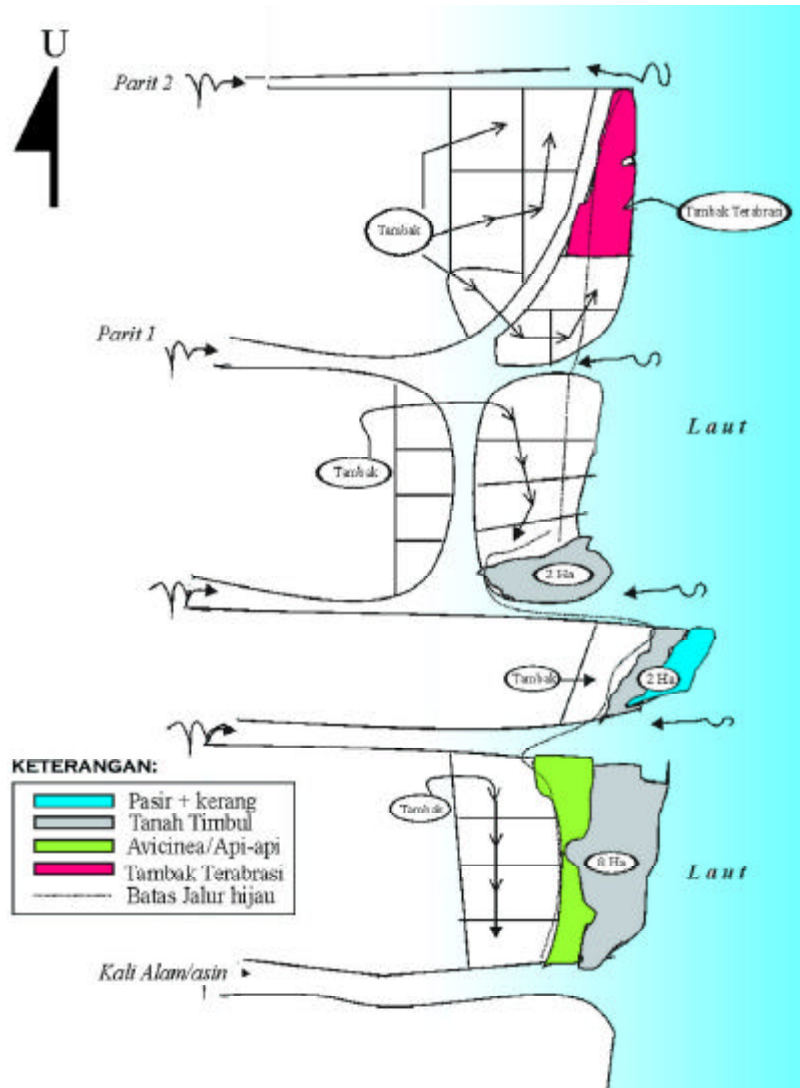
6.1.2 Rehabilitasi Mangrove

Rehabilitasi mangrove ini diawali dari keinginan petambak yang memiliki lahan dekat pantai. Kegiatan studi banding nampaknya memunculkan keinginan untuk menanam kembali mangrove di wilayah pantai desa. Masalah yang harus dihadapi untuk penanaman mangrove tersebut adalah adanya tambak-tambak yang berada tepat di tepi pantai. Untuk itu, perlu dilaksanakan penentuan batas lahan tambak yang dapat direlakan oleh petambak untuk ditanami bakau.

Tim Pantai Timur mencoba membantu para petambak ini untuk menentukan luas areal pantai yang akan ditanami bakau. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk panitia kecil sebagai penanggung jawab kegiatan sekaligus forum diskusi. Panitia ini melakukan penentuan areal dan secara musyawarah meminta kerelaan para petambak yang lahannya berada tepat di tepi pantai untuk melepaskan sebagian lahannya. Setelah areal tanam ditentukan maka panitia bekerja sama dengan kepala desa membuat patok batas areal penanaman. Setelah penentuan areal, kemudian panitia membuat satu proposal yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan untuk mendapatkan bantuan bibit dan sarana penanaman mangrove.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah pola pelaksanaan proyek Dinas Kehutanan yang masih belum bisa menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada masyarakat. Seluruh kegiatan dikendalikan oleh Dinas Kehutanan sehingga swadaya yang muncul dari masyarakat justru terhambat dengan adanya pemberian upah harian. Akibatnya masyarakat kurang bertanggung jawab atas hasil reboisasi mangrove yang dilaksanakan.

Sketsa Lokasi Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove



6.1.3 Rancangan Peraturan Desa

Bersamaan dengan perencanaan kegiatan penanaman mangrove, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan mangrove adalah masalah pemeliharaan dan pengawasan. Selama ini pengawasan dan penegakan hukum untuk kawasan lindung bisa dikatakan tidak ada. Sementara itu sosialisasi peraturan daerah mengenai kawasan sempadan pantai masih belum banyak dimengerti oleh masyarakat sehingga sebagian besar petambak sangat mengharapkan adanya peraturan yang dapat dipakai sebagai pegangan dalam pengelolaan lingkungan.

Tim Pantai Timur mencoba untuk mewujudkan aspirasi para petambak dengan membantu membuat rancangan peraturan desa sesuai kebutuhan dan kondisi di Pematang Pasir. Dalam kegiatan ini Tim Pantai Timur dibantu oleh praktisi hukum Universitas Lampung sehingga konsep peraturan desa yang dibuat oleh panitia penanaman mangrove dapat diterjemahkan ke dalam bahasa hukum (Lampiran V).

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah adanya suksesi kepala desa sehingga rancangan peraturan desa tersebut belum dapat ditetapkan secara resmi. Selain itu masih perlu dilakukan sosialisasi rancangan peraturan desa ini kepada seluruh masyarakat sehingga rancangan peraturan desa dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Untuk kelanjutan kegiatan ini, kerja sama antara panitia perancang peraturan pengelolaan mangrove dan aparat desa perlu diteruskan sehingga pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir Desa Pematang Pasir dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.

6.2. Sosial Ekonomi Masyarakat

6.2.1 Profil Desa

Pembuatan profil desa ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi Desa Pematang Pasir dari berbagai segi. Dalam proses pembuatan profil desa, dilakukan kegiatan pengumpulan data seperti data kependudukan, sosial ekonomi masyarakat, serta masalah-masalah lain yang muncul di masyarakat. Pengumpulan data dilaksanakan melalui survei dengan menggunakan kuesioner maupun wawancara langsung dengan masyarakat.

Profil Desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri sebagai dasar untuk membuat program desa sesuai dengan kebutuhannya.

6.2.2 Kelompok Swadaya Masyarakat

Masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pematang Pasir ini adalah kurangnya komunikasi antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pamong desa. Sedangkan masalah ekonomi adalah tingginya ketergantungan masyarakat untuk memperoleh modal melalui bantuan dari luar.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Tim Pantai Timur mencoba untuk berbagi informasi dengan mengadakan Pelatihan Dasar mengenai Kelompok Swadaya Masyarakat. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai cara pengelolaan suatu kelompok sebagai sarana komunikasi antar anggota dan sebagai sarana untuk meningkatkan keswadayaan melalui kegiatan simpan pinjam.



Kunjungan KSM Pasir Makmur ke KSM lain di Propinsi Lampung

Pelatihan dasar tersebut nampaknya mendapat sambutan yang cukup baik dengan terbentuknya KSM Pasir Makmur pada tanggal 4 Mei 2000. Tujuan utama pendirian KSM Pasir Makmur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan mendorong upaya-upaya pembangunan desa pada umumnya. Tujuan lain secara lengkap terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSM Pasir Makmur.

Pada awal pembentukan, KSM Pasir Makmur mempunyai anggota sebanyak 26 orang dengan aset sebesar Rp. 728.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari simpanan wajib dan simpanan sukarela. Hingga saat ini KSM Pasir Makmur telah memiliki anggota sebanyak 55 orang dengan aset sebesar Rp. 5.016.700,- (lima juta enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang berasal dari simpanan anggota dan jasa pelayanan. Seluruh anggota telah dapat menikmati pelayanan pinjaman. KSM ini secara resmi telah diketahui keberadaannya oleh Desa dan Kecamatan, dengan ditandatanganinya AD/ART lembaga ini oleh Camat Pembantu Ketapang dan Kepala Desa Pematang Pasir.

Untuk pengembangan kegiatan di masa datang, KSM Pasir Makmur telah memiliki program jangka pendek, menengah, dan panjang. Program jangka pendek KSM Pasir Makmur adalah melaksanakan penguatan ke dalam lembaga. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan memberikan pengertian dan wawasan mengenai dasar-dasar KSM pada setiap anggota baru dan masyarakat umum yang tertarik dengan kegiatan KSM. Program jangka menengah KSM Pasir Makmur adalah perluasan jaringan KSM dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan dan pentingnya pendidikan formal maupun informal. Untuk program jangka panjang secara umum KSM akan mencoba menanamkan keswadayaan dan kegotongroyongan baik kepada anggota maupun masyarakat umum serta mencoba untuk membantu dalam proses pembangunan desa. Kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan adalah memberikan beasiswa kepada putra-putri anggota KSM yang berprestasi khususnya bagi anggota yang kurang mampu. Kegiatan ini akan dilaksanakan bila KSM sudah cukup kuat. Diharapkan KSM ini dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pamong desa dalam membantu kelancaran pembangunan Desa Pematang Pasir.

6.2.3 Pendidikan Lingkungan

Hilangnya hutan mangrove dan terjadinya abrasi di wilayah pantai timur disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman mengenai ekosistem hutan mangrove dan manfaatnya bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Untuk mengatasi masalah ini dilaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan yang diberikan kepada siswa dan guru tingkat SLTP di wilayah Kecamatan Penengahan bekerja sama dengan Gerakan Pramuka Kwartir cabang Lampung Selatan.

Kegiatan pendidikan lingkungan ini dilakukan dengan mengadakan perkemahan untuk mengisi liburan siswa. Dalam perkemahan ini dilaksanakan kegiatan mencari jejak dimana siswa diminta untuk mengikuti satu rute menyusur pantai dan diberi tugas untuk melakukan pengamatan biota dan kondisi lingkungan di sepanjang rute. Sebelum kegiatan mencari jejak ini siswa dan guru pendampingnya diberikan penjelasan mengenai ekosistem mangrove dan manfaatnya bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Dengan melihat langsung kondisi lingkungan diharapkan dapat mempercepat pemahaman siswa dan guru terhadap ekosistem mangrove dan manfaatnya bagi kelestarian lingkungan kehidupan mereka sendiri. Diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut di masa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai bahan kurikulum muatan lokal.

6.3. Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan

Masalah lain yang sangat berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah pengelolaan tambak. Pola pengelolaan yang saat ini dilakukan oleh para petambak masih kurang memperhatikan dampak penggunaan obat-obatan terhadap kesuburan lahan dan lingkungan hidup di sekitarnya yang dapat berakibat buruk pada keberlanjutan usahanya di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi permasalahan ini Proyek Pesisir mencoba mempelajari kondisi-kondisi yang umumnya dihadapi oleh petambak dengan membuat tambak percobaan. Tambak percobaan dengan luas 3 (tiga) ha dipinjam dari Bapak Santoso, petambak lokal Desa Pematang Pasir.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat satu model tambak ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai sarana belajar bersama bagi para petambak mengenai proses-proses yang terjadi selama masa pemeliharaan udang.

Tabel Model Penanganan Isu

No	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
1	Berbagi informasi dengan pemerintah daerah dan berbagai lapisan masyarakat desa dengan kegiatan studi banding dan pendidikan lingkungan	Meningkatnya pemahaman petambak dan masyarakat terhadap pentingnya ekosistem mangrove bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia
2	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	Meningkatnya komunikasi diantara masyarakat dengan aparat desa serta peningkatan kesejahteraan anggota
3	Pembentukan panitia rehabilitasi mangrove	Meningkatnya partisipasi, kepedulian, dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir
4	Pelatihan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu bagi staf pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat desa	Meningkatnya pemahaman terhadap metode dan proses pengelolaan pesisir secara terpadu
5	Tambak Percobaan	Meningkatnya pemahaman petambak terhadap proses-proses pengelolaan tambak

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan tambak percobaan ini disesuaikan dengan kondisi alam dan pola budidaya tradisional plus yang umum dilakukan oleh petambak di Desa Pematang Pasir. Sejak awal proses pengolahan lahan dan selama masa pemeliharaan dipelajari pola yang biasa dilakukan oleh petambak sekaligus dilakukan upaya perbaikan dalam proses sehingga dapat diketahui penyebab kegagalan dan cara penanganannya.

Dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan ini diupayakan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang diperkirakan dapat menurunkan kesuburan lahan. Selain itu diupayakan pula pengelolaan kualitas air sesuai kondisi setempat dimana tidak tersedia sumber air tawar dan salinitas yang tinggi. Kegagalan dan keberhasilan dalam pengelolaan tambak percobaan ini diharapkan dapat menjadi bahan tukar pengalaman dengan para petambak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Heryandi. 2000. Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir (Studi di Pantai Timur Lampung), Buku I dan Buku II. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE-00/17-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Jakarta, Indonesia
- Akib, M., Heryandi. 2000. Aspek Hukum Penguasaan/Pemilikan Lahan dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Timur Lampung Selatan (Studi di Desa Pematang Pasir, Sumbernadi, dan Berundung). Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE-00/01-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Jakarta, Indonesia
- Basrowi. 2000. Perilaku Sosial Budaya Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Pembantu Ketapang, Lampung selatan. Laporan Magang, Proyek Pesisir Lampung. Bandar Lampung. Indonesia.
- Darmastuti, A., E. Rochana. 2000. Profil Potensi, Peran, dan Sumbangan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat di Wilayah Pesisir. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE-99/21-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Jakarta, Indonesia
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, dan N. Mangampe. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penerbitan khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.
- Kurniastuti. 2000. Studi Kelimpahan Plankton di Wilayah Pesisir Pematang Pasir. Laporan Magang, Proyek Pesisir Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
- Pemerintah Daerah Lampung. 2000. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama Pemerintah Daerah Lampung dengan Proyek Pesisir Lampung (Pusat Kajian Pesisir Universitas Rhode Island dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor).
- Wirawan, B., H.A. Susanto, M. Khazali. 2000. Laporan Studi Banding Pengelolaan Mangrove di Jawa. Proyek Pesisir Publication, Training Report TR-99/21-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Jakarta, Indonesia
- Wirawan, B., B. Masden, H.A. Susanto, A.K. Mahi, M.Ahmad, H. Poespitasari (editor). 1999. Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir Lampung (Pusat Kajian Pesisir Universitas Rhode Island dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor).
- Wirawan, B., E. Suyoso (editor). 1999. Pemanfaatan Lahan yang Terbuka Perolehannya di Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE-99/10-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Jakarta, Indonesia



Kegiatan diskusi dan pemetaan tambak dalam seleksi desa

LAMPIRAN I

Daftar Pertemuan dan Kegiatan Utama

No	Tanggal	A c a r a	Tempat
1	01-Apr-99	Pembentukan tim seleksi lokasi desa	Kantor Proyek Pesisir Lampung
2	08-Apr-99	Koordinasi program pengamanan Pantai Timur	PU. Pengairan
3	26-Apr-99	Pertemuan sosialisasi proyek Dinas Perikanan di Lampung Timur	Dinas Perikanan Propinsi Lampung
4	22-Jun-99	Diskusi pengelolaan Pantai Timur	Kantor Proyek Pesisir
5	29-Jun-99	Diskusi Pengelolaan Pantai Timur	Kantor Proyek Pesisir
6	28-Jul-99	Laporan kemajuan kegiatan Tim Pantai Timur (TPT)	Kantor Bupati Lamsel
7	06-Sep-99	Diskusi kegiatan TPT	Pematang Pasir
8	21-Sep-99	Sosialisasi Tim Pantai Timur dan penggalian informasi awal	Pematang Pasir
9	22 s/d 24 Sep-99	Pelatihan PRA dan ToT untuk TPT	Pematang Pasir
10	24-Jan-00	Diskusi dengan Pemda Indramayu	Pemda Indramayu, Jawa Barat
11	25-Jan-00	Diskusi dengan BBAP Jepara	BBAP Jepara, Jawa Tengah
12	27-Jan-00	Diskusi dengan Pemda Probolinggo	Desa Curah Sawo, Probolinggo, Jawa Timur
13	29-Jan-00	Diskusi dengan Pemda Pematang Pasir	Pemda Pematang Pasir, Jawa Tengah
14	15-Feb-00	Verifikasi Data Dusun Rejosari II	Dusun Rejosari II
15	18-Feb-00	Verifikasi Data Dusun Rejosari I	Dusun Rejosari I
16	19-Feb-00	Verifikasi Data Dusun Sidomukti II	Dusun Sidomukti II
17	21-Feb-00	Verifikasi Data Dusun Purwosari	Dusun Purwosari
18	22-Feb-00	Rapat kordinasi penanggulangan pantai	Desa Sumbernadi
19	26-Feb-00	Verifikasi data dan prioritas masalah	Dusun Sidomukti I
20	01-Mar-00	Verifikasi data tingkat desa	Pematang Pasir
21	05-Mar-00	Prioritas masalah tingkat desa	Pematang Pasir
22	08-Mar-00	Diskusi antara Pemda Lamsel dengan masyarakat Pematang Pasir	Pematang Pasir
23	10-Mar-00	Pertemuan dengan GP Anshor	MI Al - Ma'arif
24	15-Mar-00	Evaluasi Tim Pantai Timur	Kantor Proyek Pesisir

No	Tanggal	A c a r a	Tempat
25	15-Apr-00	Pertemuan sosialisasi motivasi kelompok	Kantor Tim Pantai Timur
26	17-Apr-00	Sosialisasi dan motivasi KSM	Rumah Ketua Kelompok Tani Sidomukti I
27	18-Apr-00	Sosialisasi dan motivasi KSM	Balai Dusun Rejosari I
28	02-Mei-00	Pelatihan dasar-dasar KSM	Kantor Tim Pantai Timur
29	03-Mei-00	Pelatihan dasar-dasar KSM	Kantor Tim Pantai Timur
30	04-Mei-00	Pembentukan KSM	Kantor Tim Pantai Timur
31	19-Mei-00	Tukar informasi dengan penjala	Kantor Tim Pantai Timur
32	19-Mei-00	Pertemuan pengurus KSM	Kantor Tim Pantai Timur
33	21-Mei-00	Pertemuan anggota KSM	Kantor Tim Pantai Timur
34	19-Jun-00	Pertemuan pengurus KSM	Kantor Tim Pantai Timur
35	20-Jun-00	Pertemuan anggota KSM	Kantor Tim Pantai Timur
36	26-Jun-00	Rencana pemasangan patok batas	Kantor Tim Pantai Timur
37	03-Jul-00	Pertemuan anggota KSM membahas konsep AD/ART	Kantor Tim Pantai Timur
38	08-Jul-00	Pertemuan pengurus KSM membahas pemantapan draft AD/ART	Kantor Tim Pantai Timur
39.	23-Jul-00	Pertemuan dengan Dinas Kehutanan mendiskusikan persiapan rehabilitasi mangrove	Rumah Kepala Desa
40.	06-Ags-00	Pertemuan dengan masyarakat dan Dinas Kehutanan	Rumah Kepala Desa
41.	12 –Ags-00	Pendidikan lingkungan dalam acara perkemahan pramuka	Kalianda
42.	15-Ags-00	Pertemuan KTF	Kalianda
43.	19-Ags-00	Pertemuan pengurus KSM	Rumah ketua KSM
44.	20-Ags-00	Pertemuan anggota KSM	Rumah ketua KSM
45.	28-31Ags-00	Pelatihan Manajemen Kelembagaan untuk KSM dan lembaga masyarakat desa lainnya	Balai Dusun Rejosari II
46.	5-Sept-00	Pendidikan lingkungan dalam acara perkemahan pramuka Kalianda	SMU Pembangunan Kalianda
47.	7-Sept-00	Pertemuan dengan masyarakat dan pemda dalam acara kemah Himpunan Mahasiswa Geografi (Imahagi)	Pematang Pasir
48.	8-Sept-00	Mengantar dan memberikan penjelasan kepada Imahagi di lokasi penanaman bakau	Pematang Pasir
49.	9-Sept-00	Presentasi dalam pertemuan dengan mahasiswa pasca sarjana IPB	Bappeda Propinsi Lampung

No	Tanggal	A c a r a	Tempat
50.	10-Sept-00	Mengantar mahasiswa pasca sarjana IPB ke Pasir Putih dan Pematang Pasir	Lampung Selatan
51.	11-Sept-00	Pertemuan pengurus KSM	Rumah Ketua KSM
52.	12-Sept-00	Pertemuan dengan ketua gerakan pramuka kwartir ranting Penengahan mendiskusikan kerjasama dalam pendidikan lingkungan	SDN. Karang sari, Kecamatan Penengahan
53.	16-Sept-00	Pertemuan anggota kwartir ranting Penengahan mendiskusikan rencana kegiatan bersama mengisi liburan siswa SMP	MTs. Al Muhajirin, Pematang Pasir
54.	20-Sept-00	Pertemuan anggota KSM	Rumah Ketua KSM
55.	2-Okxt-00	Pertemuan dengan gerakan pramuka kwartir ranting Penengahan : Pembentukan panitia perkemahan lingkungan	MTs. Al Muhajirin
56.	6-Okt-00	Pertemuan panitia perkemahan lingkungan: penjadwalan kegiatan	MTs. Al-Muhajirin
57.	13-Okt-00	Pertemuan dengan KTF: Diskusi status tanah timbul	Bappeda Lampung Selatan
58.	14-Okt-00	Pertemuan dengan nelayan: sosialisasi KSM dan diskusi permasalahan yang dihadapi nelayan	Rumah Tokoh nelayan Pematang Pasir
59.	20-Okt-00	Pertemuan rutin KSM	Rumah Ketua KSM
60.	21-22 Okt-00	Pendidikan lingkungan dalam acara perkemahan pramuka Kalianda	Lapangan Desa Pematang Pasir
61.	10-Nov-00	Menghadiri undangan panitia perkemahan yang diadakan dalam rangka menyongsong ramadhan	MTs. Al Muhajirin
62.	18-19 Nov-00	Mengisi acara perkemahan dengan pendidikan lingkungan	MTs. Al Muhajirin
63.	20-Nov-00	Pertemuan rutin KSM	Rumah ketua KSM
64.	24-Nov-00	Pertemuan KSM membahas permasalahan dalam lembaga dan rencana-rencana pengembangan kegiatan KSM	Kantor Tim Pantai Timur
65.	12-Des-00	Kunjungan DPR-RI ke Pematang Pasir	Balai Desa, dan Tambaka Percobaan
66.	17-Jan-00	Pertemuan pengurus KSM	Kantor Tim Pantai Timur

LAMPIRAN II
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Umur Tahun 2000

Dusun	0-5		6-12		13-15		16-18		19-59		59		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
Purwosari	65	58	92	118	56	41	53	38	283	283	44	39	593	577	1170
Rejosari I	63	45	79	73	31	46	29	39	216	205	40	14	458	422	880
Rejosari II	64	65	97	83	53	43	41	29	256	255	31	22	542	497	1039
Sidomukti I	52	47	64	57	18	34	29	16	177	173	8	4	348	331	679
Sidomukti II	49	44	75	61	35	33	22	27	199	197	23	9	403	371	774
Pematang Pasir	293		407		193		174		1131		146		2344		4542
		259		392		197		149		1113		88		2198	

Sumber: Data hasil survey Tim Pantai Timur tahun 1999-2000



LAMPIRAN III
Data Suku di Desa Pematang Pasir

Suku	Purwosari	Rejosari I	Rejosari II	Sidomukti I	Sidomukti II	Jumlah	Persentase %
Banten	2	3	5	6	1	17	1.6
Batak	4	1	1		3	9	0.9
Betawi			1			1	0.1
Bugis	10	3	8	3	2	26	2.5
Cina				1		1	0.1
Jawa	254	161	184	109	155	863	83.6
Lampung	3	5	3	1		12	1.2
Madura		1				1	0.1
Padang	1	2	2	1		6	0.6
Palembang	1		2			3	0.3
Sunda	6	17	27	23	20	93	9.0
Jumlah KK	281	193	233	144	181	1032	100.0

Sumber: Data hasil survey Tim Pantai Timur tahun 1999-2000

LAMPIRAN IV
Data Kondisi Pendidikan Penduduk
Desa Pematang Pasir 1999-2000

Dusun	JJ	Pendidikan																										J					
		0-5 Th		J	6-12 th				J	13-15 th				J	16-18 th				J	19-59 th							J		> 59 Th				
		TS	TK		TS	TK	SD/MI	SMP/MTs		TS	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA		TS	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA		TS	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	D1/D2	D3/Akd	PT			TS	SD	SMP/MTs	SMA/MA	
Purwosari	1170	121	2	123	44		155	11	210	2	51	41	3	97	3	42	27	19	91	38	379	81	54	5	4	5	566	26	54	1	2	83	
Rejosari I	880	105	3	108	25	2	119	6	152	4	42	28	3	77	4	27	27	10	68	9	297	77	37	1			421	4	50			54	
Rejosari II	1039	127	2	129	19		153	8	180	4	43	46	3	96		30	29	11	70	34	355	77	39	3	1	2	511	28	25			53	
Sidomukti I	679	97	2	99	24	3	86	8	121	3	23	22	4	52	2	18	18	7	45	28	226	65	28	2	1		350	1	9	2		12	
Sidomukti II	774	92	1	93	32	1	99	4	136	6	27	34	1	68		28	12	9	49	23	305	38	28			2	396	6	26			32	
Desa P. Pasir	4542	542	10	552	144	6	612	37	799	19	186	171	14	390	9	145	113	56	323	132	1562	338	186	11	6	9	2244	65	164	3	2	234	

Sumber: Data hasil survey Tim Pantai Timur tahun 1999-2000

Keterangan:

TS : Tidak Sekolah

TK : Taman Kanak-kanak

SD/MI : Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

SMP/MTs : Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

SMU/MA : Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah

D/Akd : Diploma/Akademi

PT : Perguruan Tinggi

J : Jumlah

JJ : Jumlah Jiwa

LAMPIRAN V

Rancangan Peraturan Desa

Raperdes ini masih perlu dibahas lagi lebih lanjut dan disosialisasikan ke masyarakat Desa Pematang Pasir

R A N C A N G A N

PERATURAN DESA PEMATANG PASIR KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEMATANG PASIR

- MENIMBANG :**
- Bahwa Allah SWT menciptakan kami beserta isinya hanya untuk makhluk ciptaan, oleh sebab itu wajib untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sebaik-baiknya.
 - Bahwa pantai merupakan wilayah yang bermanfaat bagi manusia dan mudah rusak oleh alam dan manusia.
 - Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, Jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya.
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
 - UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Jo PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

-
- Permendagri Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
 - Permendagri Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
 - PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
 - Keppres. Nomor 23 tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia, Jo Kep. Gub. Lampung No. G/256/BII/HK/1982 tentang Penetapan Daerah Lokasi Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai di Propinsi Lampung.
 - Perda Propinsi Lampung Nomor 10 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.
 - Perda Propinsi Lampung Nomor 10 tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
 - Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 1 tahun 1997 tentang Penetapan Garis Sempadan Pantai dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : - Peraturan Desa Pematang Pasir Kabupaten Lampung Selatan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Pantai.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan
- b. Kecamatan adalah Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
- c. Desa adalah Desa Pematang Pasir
- d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan
- f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pematang Pasir yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- g. Lingkungan Pantai adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang berada diantara Laut dan Daratan

-
- h. Perlindungan Pantai adalah usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menjaga pantai dari kerusakan
 - i. Pelestarian adalah tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut
 - j. Jalur Hijau adalah suatu areal yang ditentukan dan ditanami berbagai tanaman pelindung pantai untuk melindungi pantai dari kerusakan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1. Peraturan Desa ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Pematang Pasir Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Peraturan ini berlaku untuk segala usaha yang dilakukan di sepanjang pantai Desa Pematang Pasir

BAB III KAWASAN JALUR HIJAU

Pasal 3

- 1. Untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, dilakukan dengan usaha membentuk dan memelihara jalur hijau
- 2. Batas jalur hijau adalah 100 meter dari pasang tertinggi air laut ke arah darat sepanjang pantai
- 3. Jalur hijau ditandai dengan petak paralon beton yang ditentukan dan ditanami tumbuhan mangrove
- 4. Pada jalur hijau dilarang melakukan kegiatan yang akan merusak dan menghambat pertumbuhan Mangrove
- 5. Pada areal tanah timbul dilarang melakukan kegiatan yang akan merusak pantai, termasuk membuka tambak dan atau pengusahaan lahan lainnya.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 4

1. Setiap warga masyarakat yang tinggal di Desa Pematang Pasir mempunyai hak atas lingkungan pantai yang baik dan sehat
2. Setiap warga masyarakat yang tinggal di Desa Pematang Pasir berhak untuk memanfaatkan dan menikmati pantai tanpa merusak lingkungan terutama jalur hijau
3. Setiap warga masyarakat yang tinggal di Desa Pematang Pasir berhak untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang berkaitan dengan lingkungan terutama jalur hijau

Pasal 5

1. Setiap warga masyarakat yang tinggal di Desa Pematang Pasir berkewajiban menanam, menjaga, dan memelihara jalur hijau sesuai dengan peruntukannya
2. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk tidak menggunakan bahan apapun yang akan merusak lingkungan pantai
3. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melapor kepada pengawas pantai jika diketahui adanya kerusakan dan yang merusak jalur hijau dan lingkungan pantai, termasuk penguasaan di tanah timbul
4. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk menanam kembali jalur hijau yang rusak atau mati
5. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam setiap usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan pantai

Pasal 6

1. Pengawas pantai dan aparat desa berwenang untuk memberikan keterangan, informasi tentang pentingnya menjaga dan memelihara jalur hijau
2. Pengawas pantai dan aparat desa berwenang untuk menyampaikan laporan kepada instansi yang terkait jika terjadi perusakan lingkungan pantai atau jalur hijau
3. Pengawas pantai dan aparat desa berwenang untuk mengambil tindakan awal jika terjadi perusakan lingkungan pantai atau jalur hijau

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

1. Dalam rangka pengawasan peraturan desa ini, kepala desa dan atau perangkat desa berwenang untuk mengadakan pengawasan
2. Pengawasan yang dilakukan dapat berbentuk langsung ataupun melalui perangkat desa dan LSM

Pasal 8

1. Kepala desa dan atau aparat desa melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan usaha di sepanjang pantai Desa Pematang Pasir
2. Kepala desa dan atau aparat desa melakukan pembinaan kepada generasi muda dan atau organisasi kepemudaan yang bergerak dibidang lingkungan

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

1. Barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan rusaknya lingkungan pantai yang diatur dalam peraturan desa ini dikenakan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp..... Atau kurungan selama-lamanya bulan
2. Ketentuan ini tidak melepaskan kewajiban bagi pelanggar untuk mengembalikan fungsi jalur hijau ke keadaan semula
3. Ketentuan ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan desa ini, khususnya tentang peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Desa
2. Segala peraturan desa yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan desa ini sejak ditetapkannya peraturan desa ini dinyatakan tidak berlaku
3. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan

Disetujui oleh
Badan Perwakilan Desa
Ketua

(.....)

Ditetapkan di Desa Pematang Pasir
Pada tanggal,2001
Kepala Desa Pematang Pasir

(.....)